

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 900 / / TAHUN 2019

TENTANG KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR .... TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA ESELON III DAN IV  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019 - 2021

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas					
Tujuan 2 : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan					
<b>Sasaran :</b>					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai opini BPK atas LKPD	WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern/ Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pendapatan, dan Bidang Aset	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Derajat Otonomi Fiskal	%	Kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang Berasal dari Sumber Lain	Bidang Pendapatan	Laporan Pendapatan Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	%	Dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh Pemda dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi.	Bidang Pendapatan dan Bidang Pembelanjaan	Laporan Pendapatan Daerah, Laporan Dana Transfer, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Mewujudkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	Persentase data aset daerah/BMD yang akurat sesuai dengan pemanfaatannya	%	Jumlah aset dan Barang Milik Daerah yang terinventarisasi, teridentifikasi, dan tercatat di neraca sesuai pemanfaatannya dibagi jumlah seluruh aset dan Barang Milik Daerah x 100%	Bidang Aset	Daftar aset daerah/BMD

Persentas  
e Laporan

Magelang, Agustus 2019

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG  
Kepala Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
--------------------------------	-------------------------	--------	-------------------------------------	-----------------	-------------

Setda Kota Magelang

WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731014 199903 1 004

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS BPKAD KOTA MAGELANG DAN SUB BAGIAN DIBAWAHNYA

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>SEKRETARIS</b>					
<p><u>Tujuan</u> : Mewujudkan sistem kerja yang profesional dan didukung sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengelolaan keuangan yang berkualitas</p> <p><u>Sasaran</u> : Meningkatnya keteraturan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja BPKAD</p>	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )	Baik	Nilai LKJIP yang diperoleh atas hasil review/evaluasi kinerja tahun sebelumnya dari instansi yang berwenang	Sekretaris	Dokumen SAKIP BPKAD
<b>SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>					
<p><u>Sasaran</u> :</p> <p>1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian</p>	Prosentase surat dinas dan surat kepegawaian yang teradministrasi dengan baik	%	Jumlah surat dinas dan surat kepegawaian yang teradministrasi/terfile dengan baik dibandingkan dengan jumlah surat dinas dan surat kepegawaian yang ada dikalikan 100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Register Surat Masuk dan Keluar, File Kepegawaian OPD
<p>2. Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja untuk kenyamanan kerja aparatur</p>	Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang tercatat dan terpelihara sesuai ketentuan	%	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan barang yang tercatat dalam RKBMD/RKPBMD dibandingkan dengan jumlah barang yang ada dikalikan 100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Laporan RKBMD dan Laporan RKPBM OPD
<p>3. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan arsip perangkat daerah</p>	Prosentase penataan arsip daerah	%	Jumlah dokumen/arsip daerah yang tertata dengan baik dibagi jumlah dokumen/arsip daerah dikali 100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Laporan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip dari tiap Bidang
<b>SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN</b>					
<p><u>Sasaran</u> : Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah dan PPKD yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan</p>	Rasio capaian akuntabilitas kinerja OPD	%	Jumlah indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang capaiannya di atas 75% dibandingkan dengan jumlah indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dikalikan 100%	Kasubag Program dan Keuangan	Laporan Monev Renaksi Perjanjian Kinerja dan Data Capaian Indikator Kinerja
	Prosentase ketepatan pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan	%	Jumlah kegiatan yang capaian serapan anggaran belanjanya di atas 75% dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD dikalikan 100%	Kasubag Program dan Keuangan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
	Prosentase pengajuan pembayaran dana belanja langsung dan tidak langsung dari SKPD maupun SKPKD	%	Jumlah pengajuan permohonan surat permintaan pembayaran (SPP) dibandingkan dengan jumlah terbitnya surat perintah membayar (SPM) dikalikan 100%	Kasubag Program dan Keuangan	Register SPP/SPM BPKAD

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
--------------------------------	-------------------------	--------	-------------------------------------	-----------------	-------------

Magelang, Agustus 2019

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG  
Kepala Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan  
Setda Kota Magelang

**WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731014 199903 1 004

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG ANGGARAN BPKAD KOTA MAGELANG DAN SUBBID DIBAWAHNYA

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG ANGGARAN</b>					
Mewujudkan Sistem Penganggaran yang Efektif dan Efisien	Cakupan tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan	%	Jumlah KUA, PPAS, Raperda, Raperwal baik penetapan maupun perubahan yang tersusun sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan jumlah KUA, PPAS, Raperda, Raperwal baik penetapan maupun perubahan.	Kepala Bidang Anggaran	KUA & PPAS, KUPA & Perubahan PPAS, RKA dan RKPA SKPD
<b>Subbid Perencanaan Anggaran</b>					
Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	Tersusunnya KUA dan PPAS tepat waktu	Waktu	Waktu penetapan KUA dan PPAS APBD yang sesuai ketentuan	Kasubid Perencanaan Anggaran	KUA & PPAS
	Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan tepat waktu	Waktu	Waktu penetapan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan APBD yang sesuai ketentuan	Kasubid Perencanaan Anggaran	KUPA & Perubahan PPAS
<b>Subbid Penyusunan Anggaran</b>					
Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	Tersusunnya raperda tentang APBD tepat waktu	Waktu	Waktu penetapan Raperda tentang APBD sesuai ketentuan	Kasubid Penyusunan Anggaran	Perda APBD
	Tersusunnya raperda tentang APBD Perubahan tepat waktu	Waktu	Waktu penetapan Raperda tentang Perubahan APBD sesuai ketentuan	Kasubid Penyusunan Anggaran	Perda Perubahan APBD
<b>Subbid Pengendalian Anggaran</b>					
Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	Prosentase kegiatan yang menggunakan ASB	%	Jumlah kegiatan yang menggunakan ASB dalam penganggaran dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan x 100%	Kasubid Pengendalian Anggaran	RKA dan RKPA SKPD
	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang diteliti dan disahkan	%	Jumlah DPA SKPD yang diteliti dan disahkan dibandingkan dengan jumlah DPA SKPD x 100%	Kasubid Pengendalian Anggaran	RKA - SKPD
	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang diteliti dan disahkan	%	Jumlah DPPA SKPD yang diteliti dan disahkan dibandingkan dengan jumlah DPPA SKPD x 100%	Kasubid Pengendalian Anggaran	RKPA - SKPD

Magelang, Agustus 2019

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG  
Kepala Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang

**WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19731014 199903 1 004

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PEMBELANJAAN BPKAD KOTA MAGELANG DAN SUBBID DIBAWAHNYA

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG PEMBELANJAAN</b>					
Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	%	Jumlah pengajuan permohonan surat pencarian dan dibanfdingkan dengan jumlah jumlah terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D)	Kepala Bidang Pembelanjaan	Register SPM, Register SP2D
	Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	Buah	Tersedianya Peraturan walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Bidang Pembelanjaan	Peraturan tentang Pengelola Keuangan terbaru/ up to date
<b>Subbid Belanja Langsung</b>					
1)Terciptanya tertib administrasi pencairan dana Belanja Langsung	Prosentase pencairan dana belanja langsung	%	Jumlah pengajuan permohonan surat pencairan dana belanja langsung dibandingkan dengan jumlah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung	Kasubid Belanja Langsung	Register SPM BL, Register SP2D BL
2) Terwujudnya penatausahaan keuangan Belanja Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prosentase penatausahaan keuangan OPD sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Jumlah OPD dengan penatausahaan keuangan sesuai dengan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan dengan jumlah OPD x 100%	Kasubid Belanja Langsung	Berkas Pengajuan pencairan dana dari OPD
<b>Subbid Belanja Tidak Langsung</b>					
1)Terciptanya tertib administrasi pencairan dana Belanja Tidak Langsung	Prosentase pencairan dana belanja Tidak Langsung	%	Jumlah pengajuan permohonan surat pencairan dana belanja tidak langsung dibandingkan dengan jumlah terbitnya surat pencairan dana belanja tidak langsung	Kasubid Belanja Tidak Langsung	Register SPM BTL, Register SP2D BTL
2) Terwujudnya penatausahaan keuangan Belanja Tidak Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prosentase laporan pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung yang sesuai ketentuan.	%	Jumlah laporan pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi dibandingkan dengan jumlah laporan belanja tidak langsung dari OPD.	Kasubid Belanja Tidak Langsung	Register pengiriman SPJ BTL, Berita Acara Rekonsiliasi BTL OPD
<b>Subbid Perbendaharaan dan Pembiayaan</b>					
Terwujudnya penatausahaan keuangan Dana Transfer dan Pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan	Laporan Dana Trasfer ke Pemerintah Pusat serta Laporan Penerimaan dan Pembiayaan yang tersaji sesuai dengan ketentuan	laporan	Jumlah laporan realisasi pelaksanaan movev pencairan dan penyerapan dana transfer yang dilaporkan ke Pemerintah Pusat setiap bulannya serta Laporan Penerimaan dan Pembiayaan	Kasubid Perbendaharaan dan Pembiayaan	Simtrada ( Sistem informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa), OMSPAN ( Aplikasi Pelaporan DAK Fisik), Aladin ( Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik), LRA ( Laporan Realisasi Anggaran)

Magelang, Agustus 2019

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG  
Kepala Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang

**WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731014 199903 1 004

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KOTA MAGELANG DAN SUBBID DIBAWAHNYA

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG AKUNTANSI</b>					
Terciptanya Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Nilai opini BPK atas LKPD	-	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern/ Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah	Kabid Akuntansi	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
	2. Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	%	Perbandingan jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP dengan jumlah seluruh laporan keuangan OPD (jumlah laporan keuangan OPD yang disusun sesuai dengan SAP dibagi jumlah seluruh laporan keuangan OPD dikali 100%)		Laporan Keuangan OPD
	3. Persetujuan Perda pertanggungjawaban APBD	Waktu	Waktu penetapan perda Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan	Kabid Akuntansi	Laporan Keuangan Audited
<b>Subbid Pengembangan Akuntansi</b>					
Terciptanya Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Prosentase OPD yang telah menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	%	Jumlah OPD yang menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan perkembangan ketentuan dibandingkan dengan jumlah OPD	Kasubid Pengembangan Akuntansi	Laporan Keuangan OPD yang akurat
	Prosentasi unit kerja yang telah melaksanakan regulasi tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	%	Jumlah unit kerja yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAP dibandingkan dengan jumlah seluruh unit kerja	Kasubid Pengembangan Akuntansi	Laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP
<b>Subbid Analisa Laporan</b>					
Terciptanya Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Prosentase OPD yang telah melaksanakan asistensi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan	%	Jumlah laporan OPD yang sudah terekonsiliasi setiap bulannya dibandingkan dengan jumlah OPD	Kasubid Analisa Laporan	Laporan Keuangan OPD dan Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Neraca.
<b>Subbid Pelaporan</b>					
Terciptanya Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Prosentase penyajian Laporan Keuangan (L/K) bulanan OPD yang benar, lengkap, dan tepat waktu	%	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan (L/K) bulanan yang lengkap, benar, dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah	Kasubid Pelaporan	Laporan keuangan OPD yang lengkap dan sesuai SAP

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
--------------------------------	-------------------------	--------	-------------------------------------	-----------------	-------------

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG  
Kepala Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang

WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731014 199903 1 004



III. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PENDAPATAN BPKAD KOTA MAGELANG DAN SUBBID DIBAWAHNYA

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG PENDAPATAN</b>					
Sasaran Program : Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	1. Persentase pertumbuhan PAD	%	Perbandingan antara kenaikan PAD tahun (x) dengan PAD tahun (x)-1 ((jumlah PAD th.x dikurangi PAD th.x-1) dibagi PAD th.x dikali 100%)	Kabid Pendapatan	Laporan Realisasi Pendapatan Bulanan
	2. Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	(Realisasi pajak daerah dibagi PAD) x 100%	Kabid Pendapatan	Laporan Realisasi Pajak Daerah
	3. Rasio retribusi daerah terhadap PAD	%	(Realisasi retribusi daerah dibagi PAD) x 100%	Kabid Pendapatan	Laporan Realisasi Retribusi Daerah
	4. Derajat Otonomi Fiskal	%	Kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.	Kabid Pendapatan	Laporan Pendapatan Asli Daerah dan Laporan Dana Transfer
	5. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	%	Dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi.	Kabid Pendapatan	Laporan Dana Transfer dan Laporan Pendapatan Daerah
<b>Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah</b>					
Sasaran kegiatan : Tercapainya peningkatan jumlah Wajib Pajak Daerah yang terdaftar	Rasio (NPWPD) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	%	Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dibagi jumlah potensi Wajib Pajak	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Data Wajib Pajak dan Data Potensi Wajib Pajak Daerah
<b>Subbid Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan</b>					
Sasaran kegiatan : Tercapainya tertib administrasi laporan pendapatan daerah.	Rasio Capaian Laporan Pendapatan Daerah OPD	%	Jumlah laporan OPD yang tepat waktu dibagi jumlah OPD penghasil pendapatan	Kasubid Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan	Laporan Pendapatan Daerah OPD
<b>Subbid Penagihan dan Keberatan</b>					
Sasaran kegiatan : Tertagihnya tunggakan pajak daerah.	Rasio Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	Jumlah tunggakan pajak daerah dibagi jumlah target pajak daerah	Kasubid Penagihan dan Keberatan	Data Tunggakan Pajak Daerah

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
--------------------------------	-------------------------	--------	-------------------------------------	-----------------	-------------

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG  
Kepala Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang

**WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE**

Pembina Tingkat I

NIP. 19731014 199903 1 004

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG ASET BPKAD KOTA MAGELANG DAN SUBBID DIBAWAHNYA

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG ASET</b>					
Terciptanya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	jumlah laporan tahunan BMD tepat waktu dibagi jumlah semua laporan tahunan OPD dikali 100%	Kepala Bidang Aset	Laporan Barang Milik Daerah
	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	jumlah laporan semesteran BMD tepat waktu dibagi jumlah semua laporan semesteran OPD dikali 100%	Kepala Bidang Aset	Laporan Barang Milik Daerah
	Barang Milik Daerah yang didayagunakan	%	jumlah barang milik daerah yang didayagunakan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah dikali 100%	Kepala Bidang Aset	Daftar Aset yang didayagunakan
	Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	%	jumlah bidang aset tanah bersertifikat yang tercatat di neraca dibagi jumlah bidang seluruh aset tanah yang tercatat di neraca dikali 100%	Kepala Bidang Aset	Sertifikat tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Magelang
<b>Subbid Perencanaan dan Penghapusan Aset</b>					
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tepat waktu	Waktu	Waktu penetapan RKBMD sesuai ketentuan	Kasubid Perencanaan dan Penghapusan Aset	Laporan RKBMD
<b>Subbid Penatausahaan Aset</b>					
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyajian Laporan Tahunan Barang Milik Daerah kepada BPK yang benar, lengkap, dan tepat waktu	Waktu	Waktu Penyajian Laporan Tahunan Barang Milik Daerah kepada BPK yang benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan	Kasubid Penatausahaan Aset	Laporan BMD
<b>Subbid Pendayagunaan Aset</b>					
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah yang Didayagunakan	%	Jumlah Barang Pengelola yang sudah didayagunakan dibandingkan dengan jumlah Barang Pengelola yang disetujui untuk didayagunakan x 100%	Kasubid Pendayagunaan Aset	1. Data BMD 2. Laporan Bendahara Penerimaan Pemanfaatan Aset
	Cakupan Bukti Kepemilikan Aset	%	Jumlah Bidang Tanah bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang dibandingkan dengan jumlah Bidang Tanah Pemerintah Kota Magelang x 100%	Kasubid Pendayagunaan Aset	1. Data BMD 2. KIP A Tanah

Magelang, Agustus 2019

Kepala Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang

**WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE**

Pembina Tingkat I

NIP. 19731014 199903 1 004